



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENURUNAN *PURCHASING MANAGER'S INDEX* MANUFAKTUR INDONESIA

Dewi Wuryandani
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.zanggi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia menghadapi tantangan baru dalam perekonomian di mana terjadi penurunan level *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur dalam beberapa bulan terakhir, yang mencerminkan terjadinya penurunan aktivitas di sektor industri manufaktur. Berdasarkan data Standard & Poor's (S&P) Global, PMI manufaktur Indonesia mengalami penurunan sejak bulan April 2024 dan bahkan pada dua bulan terakhir berada pada level di bawah 50, yaitu di level 49,3 pada bulan Juli 2024 dan di level 48,9 pada bulan Agustus 2024. Level PMI manufaktur di bawah 50 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia sedang tidak baik atau berada pada kategori kontraksi. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjelaskan bahwa penurunan level PMI manufaktur pada bulan Agustus 2024 terjadi akibat belum adanya kebijakan signifikan dari kementerian/lembaga lain yang mampu meningkatkan kinerja industri manufaktur. Penurunan level PMI manufaktur memunculkan berbagai pertanyaan mengenai penyebab dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi situasi ini.

Dalam laporan S&P Global, dijelaskan bahwa terdapat pelemahan penjualan yang mengakibatkan peningkatan jumlah stok barang jadi selama dua bulan berturut-turut. Menteri Perindustrian pun mengungkapkan bahwa pelemahan penjualan dipengaruhi oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar ke pasar dalam negeri, terutama sejak bulan Mei 2024. Hal ini bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dimungkinkan adanya korelasi antara kebijakan Kementerian Perdagangan dengan turunnya level PMI manufaktur karena masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi produk impor yang lebih murah dengan alasan ekonomis. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan penjualan produk industri manufaktur dalam negeri dan penurunan utilisasi mesin produksi. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang konstruktif antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar kebijakan yang diambil tidak bertabrakan dan merugikan satu sama lain.

Selain itu, penyebab lain turunnya level PMI manufaktur adalah pelaku industri manufaktur di Indonesia masih mengamati perkembangan terkait rencana penerapan aturan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan oleh Kementerian Keuangan. Penerapan aturan ini dinilai akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat karena akan menurunkan konsumsi masyarakat terhadap gula, namun berdampak negatif pada sektor industri manufaktur karena akan menyebabkan terjadinya perlambatan ekspansi usaha. Penurunan level PMI manufaktur juga diakibatkan oleh menurunnya permintaan secara global dan daya beli masyarakat. Dalam laporan S&P Global, dijelaskan bahwa terjadi penurunan tajam permintaan baru yang menyebabkan penurunan produksi. Pelemahan produksi dan penurunan permintaan baru inilah yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pabrik-pabrik

sektor industri manufaktur di Indonesia. Tidak ada penggantian karyawan yang keluar atau terkena PHK akibat turunnya produksi dan permintaan tersebut. Pelaku industri manufaktur pun menyatakan bahwa mereka membutuhkan insentif dari pemerintah terkait masifnya keputusan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK.

Indonesia Labor Institute memprediksi jumlah PHK yang terjadi hingga bulan September 2024 ini akan menyentuh sekitar 50.000 pekerja yang mayoritas berasal dari sektor industri manufaktur. Hal ini tentu akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru nantinya. Oleh karena itu, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diefektifkan implementasinya sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang terkena PHK. Secara umum, perbaikan terkait koordinasi dan penetapan regulasi secara simultan dan bersinergi antarkementerian/lembaga perlu segera dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pada sektor industri manufaktur.

Atensi DPR

Industri manufaktur merupakan salah satu penggerak utama laju pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan *multiplier effect* bagi sektor lainnya. Oleh karena itu, penurunan level PMI manufaktur Indonesia yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang mencerminkan terjadinya penurunan aktivitas di sektor industri manufaktur, perlu segera diatasi. Terlebih, dalam dua bulan terakhir level PMI manufaktur Indonesia berada pada level di bawah 50 yang menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia sedang berada pada kategori kontraksi. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah yang berdampak langsung dalam mengatasi permasalahan di sektor industri manufaktur. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang memengaruhi turunnya level PMI manufaktur Indonesia.

Sumber

cncindonesia.com, 3 September 2024;
kompas.id, 2 September 2024;
kontan.co.id, 3 September 2024;
metrotvnews.com, 5 September 2024;
pmi.spglobal.com, 2 September 2024; dan
rri.co.id, 4 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.